KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA MENINGKAT

PENGUKURAN
KETIMPANGAN SOSIAL
MENURUT PERSEPSI WARGA
2017

BAGUS TAKWIN, DKK

infid

International NGO Forum on Indonesian Development

KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA MENINGKAT

PENGUKURAN KETIMPANGAN SOSIAL MENURUT PERSEPSI WARGA 2017

Tim Penyusun:
Bagus Takwin
M. Himawan Arifianto
Alfindra Primaldhi
Paksi Walandow
Sahat K. Panggabean

infid
International NGO Forum on Indonesian Development

DAFTAR ISI

1

RINGKASAN

5

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 6
1.2. Pertanyaan Utama 10
1.3. Tujuan Pengukuran Ketimpangan Sosial 10
1.4. Manfaat Indeks Ketimpangan Sosial 11

12

BAB 2. TEMUAN-TEMUAN PENGUKURAN KETIMPANGAN SOSIAL

2.1. Sumber Ketimpangan Sosial 13
2.2. Seberapa Jauh Ketimpangan Terjadi? 15
2.2.1. Ketimpangan Secara Umum 15
2.2.2. Ketimpangan Setiap Ranah 15
2.3. Ketimpangan Penghasilan 18
2.4. Ketimpangan Gender 19

20

BAB 3. INDEKS KETIMPANGAN SOSIAL, DISKRIMINASI DAN BANTUAN HUKUM

3.1. Indeks Ketimpangan Sosial 2016 21
3.2. Indeks Ketimpangan Sosial Per Wilayah 24
3.3 Prosentase Warga Yang Mengalami Ketimpangan Setidaknya di Satu Ranah 26

27

BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan 28
4.2. Rekomendasi 28

32

DAFTAR PUSTAKA

33

LAMPIRAN 1. KERANGKA TEORETIK

33

LAMPIRAN 2. METODE

RINGKASAN

Sejak awal tahun 2017, berbagai media massa memberikan tingginya ketimpangan di Indonesia dan termasuk yang terburuk di dunia. Sinyalemen itu sesuai juga dengan apa yang ditemukan INFID dalam survey ketimpangan sosial menurut persepsi warga. Di tahun 2017, INFID melakukan pengukuran penilaian warga mengenai ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia selama tahun 2016/2017. Hasilnya menunjukkan ada kenaikan ketimpangan sosial menurut warga. Indeks ketimpangan yang diperoleh lebih baik dari tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan berubah dari 4,4 menjadi 5,6. Artinya setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia. Indeks ketimpangan di tahun 2017 tergolong tinggi.

Secara keseluruhan, 84% responden (dari total sampel 2250 orang) mempersepsikan adanya ketimpangan setidaknya pada satu ranah. Bisa dikatakan, 8 dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan. Peningkatan ketimpangan sosial ini mengindikasikan belum adanya usaha yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan di berbagai ranah. Evaluasi terhadap usaha penanganan masalah ketimpangan di Indonesia perlu di lakukan secara sistematis agar dapat dilakukan perbaikan yang tepat sasaran.

Penghasilan dirasakan oleh warga sebagai ranah yang paling timpang dan paling besar peranannya dalam menghasilkan ketimpangan sosial. Ketimpangan penghasilan berdampak pada ketimpangan pada kepemilikan rumah dan harta benda, pendidikan dan kesehatan. Pengaruh ketimpangan penghasilan terhadap ketimpangan sosial keseluruhan paling besar. Ketimpangan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan merupakan ranah kedua yang dianggap paling timpang dan menjadi faktor terbesar dalam menghasilkan ketimpangan sosial.

Ketimpangan merata di wilayah Indonesia: Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Indonesia bagian Timur ketimpangan lebih tinggi dari wilayah lainnya. Selian itu, diskrimisnasi dipersepsi oleh warga terjadi baik di Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur. Persepsi pengalaman diskriminasi lebih tinggi di Indonesia bagian Timur dan Sumatra, bila dibandingkan dengan rata-rata (seluruh Indonesia). Warga juga menilai masih terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Persepsi ketimpangan gender lebih tinggi di wilayah Indonesia Bagian Timur dibandingkan dengan wilayah Indonesia Bagian Barat. Dua aspek yang dinilai paling timpang di antara laki-laki dan perempuan adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

Rekomendasi

1. Selain peningkatan kesempatan kerja dan penyetaraan penghasilan, diperlukan program sosial dalam

bentuk pemberian tunjangan bagi pencari kerja sebagai salah satu cara
2. untuk mengurangi ketimpangan penghasilan. Pemberian tunjangan ini dapat berperan untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Bentuk dari tunjangan bagi pencari kerja dapat terdiri atas dua jenis:
    a. Tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program asuransi;
    b. Tunjangan dalam bentuk bantuan konsultasi dan agen pencarian kerja bagi para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
3. Diperlukan program sosial dalam bentuk tunjangan pelatihan kerja untuk meningkatkan atau menambah keahliannya, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Peningkatan keahlian atau tambahan keahlian baru diperlukan untuk dapat meningkatkan penghasilan para pekerja.
4. Paket penyelamatan" untuk semua orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan dengan gaji bagus, agar mereka dapat memperoleh dan mempertahankan pekerjaan dengan penghasilan yang baik.
5. Mengurangi pengangguran dengan:
    a. Skema penciptaan lapangan kerja yang disponsori pemerintah.
    b. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan kemampuan kerja, seperti skema *re-training*.
    c. Skema kesejahteraan kerja yang mendorong partisipasi pasar tenaga kerja.
    d. Menyelenggarakan program pelatihan sektoral, magang, dan program kerja sambil belajar.
    e. Berikan insentif yang kuat untuk penciptaan lapangan kerja di dalam kota/kabupaten.
6. Meningkatkan bimbingan dan upaya lainnya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik.
7. Meningkatkan dana pemerintah untuk opsi penitipan anak berkualitas tinggi.
8. Memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
9. Realokasi dana 5-10% untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN
10. Memastikan menyempitnya kesenjangan antara daerah dalam pembangunan manusia dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas SDM bagi an kelompok masyarakat miskin.
11. Memperbaharui kebijakan pajak di Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi Indonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil.
12. Perbaikan Undang-Undang Perpajakan agar dapat mengakomodasi potensi

pendapatan pajak dan realitas kekayaan kelompok super kaya Indonesia.

13. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pengurangan ketimpangan disarankan untuk dilakukan secara komprehensif. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan dampak. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan program, melainkan perlu dilakukan dalam keseluruhan rentang pelaksanaan program, sejak awal, pertengahan hingga akhir program sehingga selain dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan program berikutnya, juga menjadi dasar untuk perbaikan program yang sedang berlangsung.

SECARA KESELURUHAN, 84% RESPONDEN (DARI TOTAL SAMPEL 2250 ORANG) MEMPERSEPSIKAN ADANYA KETIMPANGAN SETIDAKNYA PADA SATU RANAH. BISA DIKATAKAN, 8 DARI 10 WARGA INDONESIA MEMPERSEPSI ADANYA KETIMPANGAN.

BAB 1
PENDAHULUAN

"Identifikasi ketimpangan sosial merupakan salah satu usaha yang penting dalam mencegah dan mengatasi ketidakadilan sosial. Identifikasi itu perlu dilakukan di ranah-ranah kehidupan masyarakat"

1.1. Latar Belakang

Sejak awal tahun 2017, berbagai media massa memberikan tingginya ketimpangan di Indonesia dan termasuk yang terburuk di dunia. Lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, melakukan survey yang dirilis di akhir tahun 2016 yang hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. Berdasarkan survei lembaga itu, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand.

Sinyalemen itu sesuai juga dengan apa yang ditemukan INFID dalam survey ketimpangan sosial menurut persepsi warga. Meski menurut Pemerintah ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia sedikit menurun pada September 2017, dalam survey yang dilakukan INFID pada Agustus-Oktober 2017, warga menilai ketimpangan di Indonesia meningkat. Seperti dua tahun sebelumnya, di tahun 2017, INFID melakukan pengukuran penilaian warga mengenai ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia selama tahun 2016/2017. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam penilaian warga ada kenaikan ketimpangan sosial. Indeks ketimpangan yang diperoleh lebih baik dari tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan berubah dari 4 menjadi 5,6. Artinya setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia. Indeks ketimpangan di tahun 2017 tergolong tinggi.

INFID melakukan pengukuran ketimpangan sosial menurut persepsi warga dengan didasari konsep keadilan sosial. Secara sederhana, ketimpangan sosial adalah perbedaan penghasilan, sumber daya, kekuasaan dan status di dalam dan di antara masyarakat (Naidoo dan Wills, 2008). Secara lebih rinci, ketimpangan sosial merujuk pada tingkat perbedaan kategori sosial orang (menurut karakteristik seperti jenis kelamin, usia, kelas, dan etnis) dalam hal akses ke berbagai kemaslahatan sosial, seperti tenaga kerja pasar dan sumber penghasilan, sistem pendidikan dan

kesehatan, serta bentuk-bentuk representasi dan partisipasi politik.

Ketimpangan sosial juga mencakup perbedaan kesempatan dan akses pada sumber daya, serta proses-proses yang menghasilkan kesempatan dan akses itu. Amartya Sen (1982) menekankan bahwa penting untuk melihat ketimpangan berdasarkan kesempatan (kapabilitas dasar: pendidikan dan kesehatan) dan ketimpangan berdasarkan proses (demokrasi, kemampuan mengontrol sumber daya, dan lingkungan). Dengan ini, konsep ketimpangan sosial dapat kita gunakan untuk memberikan gambaran perbedaan antara penghasilan rata-rata serta apa yang didapatkan oleh orang miskin dan kaya atau memiliki akses pendidikan yang baik dan yang tidak, serta bentuk-bentuk pengelompokan yang lain dalam masyarakat. Dengan konsep ketimpangan sosial, kita dapat mengenali seberapa baik distribusi-distribusi sumber daya dan infrastruktur pada warga negara yang berbeda latar belakangnya.

Secara operasional, ketimpangan sosial mencakup baik ketimpangan penghasilan, maupun ketimpangan di ranah lainnya yaitu kesempatan mendapatkan pekerjaan, kepemilikian harta benda, rumah/tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan keluarga, kualitas lingkungan tempat tinggal, keterlibatan politik, dan hukum. Ranah ini tercakup dalam enam dimensi keadilan sosial: pencegahan kemiskinan, akses ke pendidikan, inklusi pasar tenaga kerja, kohesi sosial dan non-diskriminasi, kesehatan, dan keadilan antar generasi.

Keadilan sosial di sini didefinisikan sebagai keadilan dalam distribusi kemakmuran, kesempatan dan previlese, termasuk cara dan prosedur pendistribusian serta akses terhadap sumber daya yang menghasilkan kemakmuran. Keadilan sosial adalah elemen konstitutif pusat dari legitimasi dan stabilitas dari setiap komunitas politik. Tanpa keadilan sosial, legitimasi komunitas politik lemah dan tak stabil. Postulat yang mendasarinya adalah setiap individu harus diberdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri, dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas. Konsep keadilan ini menekankan penjaminan setiap kesempatan individu yang benar-benar sama untuk realisasi diri

KETIMPANGAN SOSIAL ADALAH PERBEDAAN PENGHASILAN, SUMBER DAYA, KEKUASAAN DAN STATUS DI DALAM DAN DI ANTARA MASYARAKAT

(NAIDOO DAN WILLS, 2008)

melalui investasi yang ditargetkan dalam pengembangan kapabilitas indivdu.

Dengan dasar konsep keadilan sosial, maka ketimpangan sosial merupakan keadaan yang bertentangan dengan keadilan karena membuat warga tidak berdaya mengejar arah kehidupannya. Membiarkan ketimpangan sama saja dengan membiarkan latar belakang sosial tertentu mempengaruhi secara negatif rencana kehidupan pribadi. Pembiaran ini bertentangan dengan keadilan sosial. Keadilan sosial bukan hal yang terberi begitu saja atau sesuatu yang otomatis berfungsi di masyarakat, melainkan kondisi yang perlu terus menerus diupayakan, dihadirkan dalam kehidupan bersama, mulai dari identifikasi faktor yang bekemungkinan besar menghasilkan ketidakadilan, hingga mengupaya program dan aktivitas yang menghasilkan keadilan.

Identifikasi ketimpangan sosial merupakan salah satu usaha yang penting dalam mencegah dan mengatasi ketidakadilan sosial. Identifikasi itu perlu dilakukan di ranah-ranah kehidupan masyarakat seperti penghasilan, kepemilikan benda, kesehatan, pendidikan, hukum, gender, dan politik. Dengan demikian, perlu ada aktivitas pengukuran ketimpangan, termasuk mengukur persepsi yang mengandung penilaian warga mengenai ketimpangan yang terjadi di masyarakatnya. Ini mendasari pengukuran ketimpangan sosial menurut persepsi warga yang dilakukan oleh INFID. Ketimpangan sosial merupakan indikator dari keadilan sosial. Pengukuran ketimpangan sosial menurut warga dapat memberikan pemahaman mengenai ketimpangan apa saja yang terjadi di Indonesia menurut warga.

Seperti pada dua tahun sebelumnya, pengukuran persepsi mengenai ketimpangan sosial 2017 ini merupakan satu bentuk audit dari warga terhadap kondisi keadilan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Hasilnya dapat menjadi bahan pembanding dan pelengkap pengukuran ketimpangan dalam bentuk lain yang sudah dilakukan juga di Indonesia, seperti *Gini Ratio* yang umum dijadikan indeks dari ketimpangan distribusi pendapatan. Penilaian dari sudut pandang warga ini dilakukan untuk mengatasi dan memperkecil kemungkinan bias rezim yang muncul dalam evaluasi dan laporan pemerintah.

Pengukuran Ketimpangan Sosial ini dilakukan melalui metode survei dengan

kuesioner terhadap 2250 responden dengan menggunakan alat ukur Ketimpangan Sosial yang mengukur penilaian warga mengenai ketimpangan di beberapa ranah. Dalam survey ini, warga diminta untuk menilai di ranah mana saja ketimpangan terjadi di Indonesia.

Pengukuran Ketimpangan Sosial ini merupakan bagian dari tugas INFID sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki mandat untuk memantau pembangunan, dan berdasarkan hasil pemantauan itu, berupaya untuk mengubah kebijakan dan program pembangunan agar menjadi lebih inklusif, bermanfaat, imparsial, dan tidak diskriminatif. Dalam menjalankan mandatnya, INFID menaruh perhatian besar terhadap kemiskinan, ketimpangan penghasilan, ketimpangan kesempatan terutama kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, serta belum adanya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Pengukuran yang dilakukan kali ini merupakan usaha untuk melengkapi bentuk pemantauan pembangunan Indonesia yang selama ini sudah dilakukan oleh INFID.

1.2. Pertanyaan Utama

Pertanyaan yang diajukan dalam Survei Ketimpangan Sosial Menurut Warga 2017 terdiri atas:

1. Ranah/aspek/hal apa yang berperan menghasilkan ketimpangan sosial di daerah Anda?
2. Dalam setiap ranah/aspek/hal yang berperan itu, seberapa besar ketimpangan sosial yang terjadi di daerah Anda?
3. Apa yang menyebabkan ketimpangan di daerah Anda?
4. Seberapa jauh ketimpangan gender terjadi di daerah Anda?

1.3. Tujuan Pengukuran Ketimpangan Sosial

Survei Ketimpangan Sosial yang dilakukan INFID ini bertujuan untuk menggali persepsi warga mengenai:

1. Ranah/aspek/hal yang berperan menghasilkan ketimpangan sosial di Indonesia;
2. Seberapa besar ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia;
3. Penyebab ketimpangan sosial di Indonesia;
4. Ketimpangan gender di Indonesia;

5. Usulan cara mengurangi ketimpangan di Indonesia.

1.4. Manfaat Indeks Ketimpangan Sosial

1. Indeks Ketimpangan Sosial berfungsi sebagai alat advokasi pembangunan yang kuat dan secara bersama melibatkan partisipasi anggota INFID di berbagai kota di Indonesia.
2. Indeks Ketimpangan Sosial dapat digunakan sebagai laporan pemantauan pembangunan yang reguler dan mudah dimengertidan dipahami oleh publik, media massa, dan pengambil kebijakan.
3. Indeks Ketimpangan Sosial berfungsi sebagai *feedback* dan evaluasi mengenai kinerja dan capaian kebijakan program sosial untuk mengatasi ketimpangan bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah mengenai kinerja serta capaian program sosial.

BAB 2

TEMUAN-TEMUAN PENGUKURAN KETIMPANGAN SOSIAL

"Secara keseluruhan warga menilai terjadi peningkatan ketimpangan di berbagai ranah sosial yang tercakup dalam dimensi-dimensi keadilan sosial"

Bab ini akan memaparkan hasil survei persepsi warga mengenai ketimpangan sosial di Indonesia.

2.1. Sumber Ketimpangan Sosial

Survei ini hendak menjawab pertanyaan: Sejauh mana, menurut warga, ketimpangan sosial terjadi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu ditanyakan dulu: Apa sumber ketimpangan sosial yang terjadi di kehidupan warga? Seberapa jauh ketimpangan dan perlakukan diskriminatif berlangsung di masyarakat Indonesia? Bagaimana penyebaran ketimpangan di wilayah Indonesia?

Kita akan mulai dengan mengidentifikasi ranah-ranah yang menjadi sumber ketimpangan. Ranah-ranah ini ditentukan berdasarkan ranah kepuasan hidup yang mempengaruhi kapabilitas, kesempatan, kebebasan, kontrol terhadap sumber daya, kepuasan hidup, dan kebahagiaan individu. Dalam pengukuran ini ranah itu terdiri atas penghasilan, harta benda yang dimiliki, kesejahteraan keluarga, pendidikan, pekerjaan, rumah/tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal, hukum, kesehatan, dan aktivitas politik.

Dalam survey ini, warga diminta menilai sejauh mana ranah-ranah ini menjadi sumber ketimpangan dan sejauh mana ketimpangan yang ada di setiap ranah. Secara umum, hasil yang didapatkan adalah warga mempersepsikan bahwa ranah-ranah itu merupakan sumber ketimpangan sosial.

Jika sumber dari ketimpangan dalam masyarakat diurutkan, kita akan dapat melihat aspek apa yang paling menimbulkan masalah ketimpangan ini. Urutan tertinggi diurutkan dari atas. Urutan dari sumber ketimpangan di masyarakat adalah:

1. Penghasilan;
2. Kesempatan mendapatkan pekerjaan;
3. Rumah/tempat tinggal;
4. Harta benda yang dimiliki;
5. Kesejahteraan keluarga;
6. Kesempatan dan tingkat pendidikan;
7. Kualitas Lingkungan tempat tinggal;
8. Keterlibatan dalam politik;
9. Hukum;
10. Kesehatan.

Grafik 1.
Sumber dan Ranah Ketimpangan dalam Masyarakat

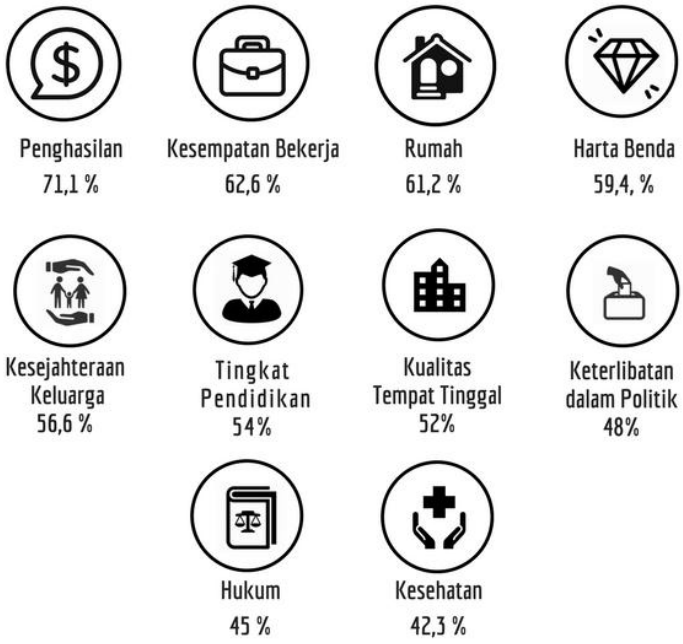

Dari data ini dapat diketahui di ranah mana sering terjadi ketimpangan di masyarakat menurut warga. Penghasilan dan kesemptan mendapatkan pekerjaan merupakan dua ranah yang paling banyak terjadi ketimpangan. Sementara hukum dan kesehatan dinilai sebagai ranah yang paling sedikit terjadi ketimpangan, meskipun ketimpangan di dua ranah ini tetap dinilai cukup tinggi ketimpangannya oleh warga. Bila dirata-ratakan, lebih dari 50% warga menilai bahwa di setiap ranah itu terjadi ketimpangan. Persepsi mengenai ketimpangan ini penting untuk diatasi, lepas dari apakah pada keadaan aktualnya memang terjadi ketimpangan atau tidak, karena persepsi mengenai ketimpangan, juga mengenai kemiskinan, dapat berefek pada penghayatan subyektif yang membawa orang pembuatan keputusan tidak efektif yang merugikan, mengancam kesehatan dan menghasilkan ketidakstabilan (Payne, 2017).

2.2. Seberapa Jauh Ketimpangan Terjadi?

2.2.1. Ketimpangan Secara Umum

Secara umum warga cenderung menilai di daerah mereka terjadi ketimpangan. Data menunjukkan kebanyakan responden memilih opsi “sedikit timpang”, “timpang”, dan “sangat timpang” yang total prosentasenya sebesar 60,6%. Pilihan terbanyak jatuh pada “sedikit timpang” dan pilihan paling sedikit jatuh pada “sangat timpang”.

Grafik 2. Ketimpangan secara umum

2.2.2. Ketimpangan Setiap Ranah

Warga mempersepsi ketimpangan terjadi di 10 ranah yang dinilai sebagai sumber ketimpangan. Derajat ketimpangannya tergolong tinggi, terlihat dari penilaian responden yang lebih banyak memilih “timpang” hingga “sangat timpang”. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga bisa dikatakan bahwa berdasarkan data yang didapat, ranah-ranah yang disebutkan dalam grafik di bawah ini lebih buruk dalam hal ketimpangan dibandingkan dengan tahun lalu.

Grafik 3. Penilaian derajat ketimpangan setiap ranah

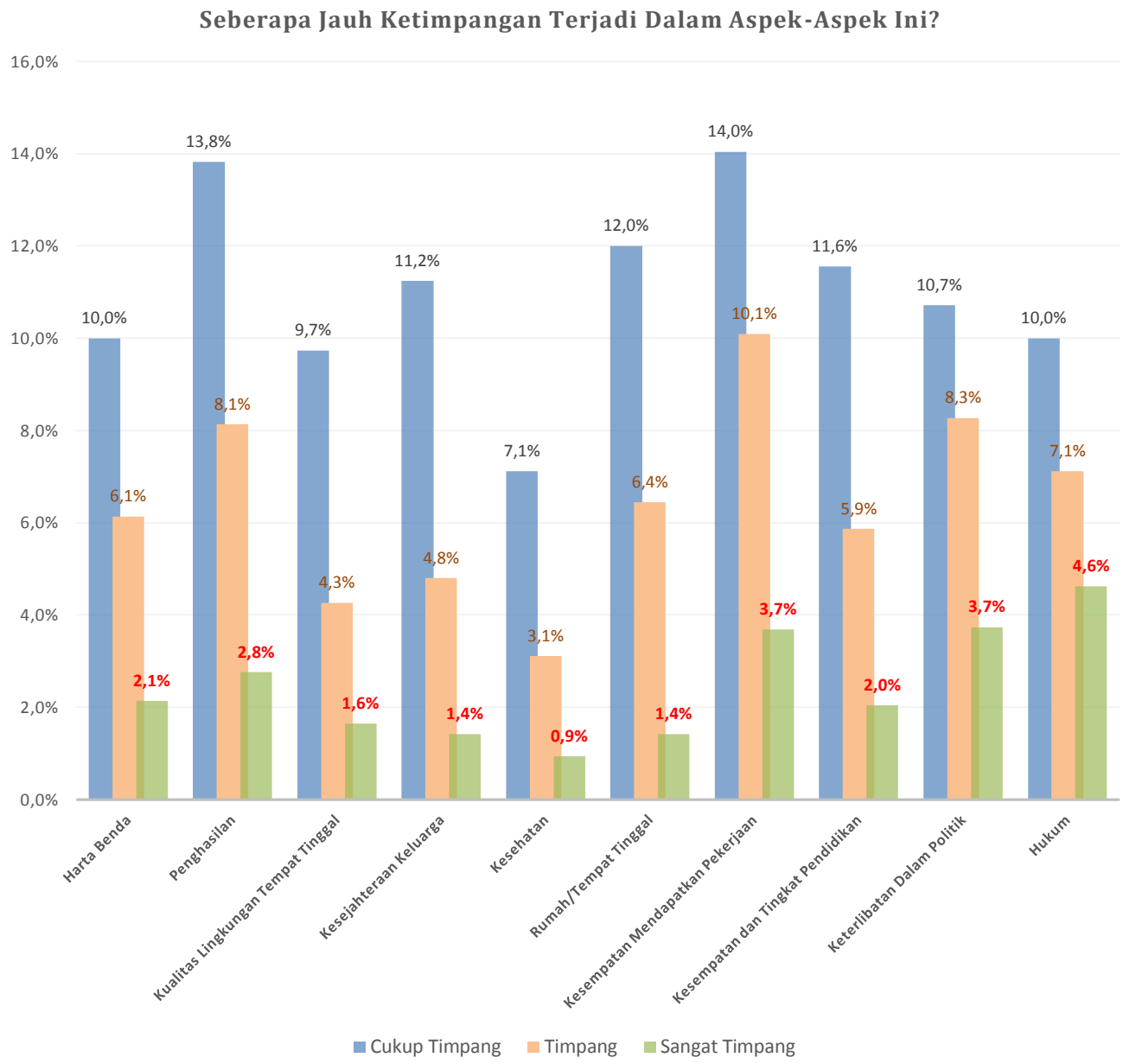

Sejalan dengan ranah yang dinilai paling menjadi sumber ketimpangan, maka ketimpangan pun dinilai paling banyak terjadi di ranah itu sehingga derajat ketimpangannya pun paling tinggi. Grafiik selanjutnya memaparkan indeks derajat ketimpangan di setiap ranah

Grafik 4. Derajat Ketimpangan di Setiap Ranah

2.3. Ketimpangan Penghasilan

Untuk mengetahui ketimpangan penghasilan menurut warga, kepada responden diajukan pertanyaan mengenai kesesuaian penghasilan responden dengan yang diharapkan oleh mereka. Penghasilan dirasakan oleh warga sebagai ranah yang paling timpang dan paling besar peranannya dalam menghasilkan ketimpangan sosial. Sebesar 54,2% masyarakat merasa penghasilan mereka berada dibawah harapan mereka, serta dinilai kurang dan tidak layak oleh mereka. Sementara, 40,1% menilai penghasilan mereka layak atau lebih dari layak.

Dari hasil ini dapat diperoleh indikasi bahwa ketimpangan di penghasilan masih cukup besar. Dapat disimpulkan bahwa jika dibagi berdasarkan kesesuaian penghasilan, masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) Warga yang berpenghasilan kurang layak; (2) Warga yang berpenghasilan layak; dan (3) Warga yang berpenghasilan lebih dari layak. Kelompok dengan proporsi terbesar adalah kelompok warga yang berpenghasilan layak, diikuti dengan kelompok warga yang berpenghasilan kurang layak. Proporsi terkecil adalah warga yang berpenghasilan lebih dari layak. Keadaan ini tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

Grafik 5. Kesesuaian Penghasilan

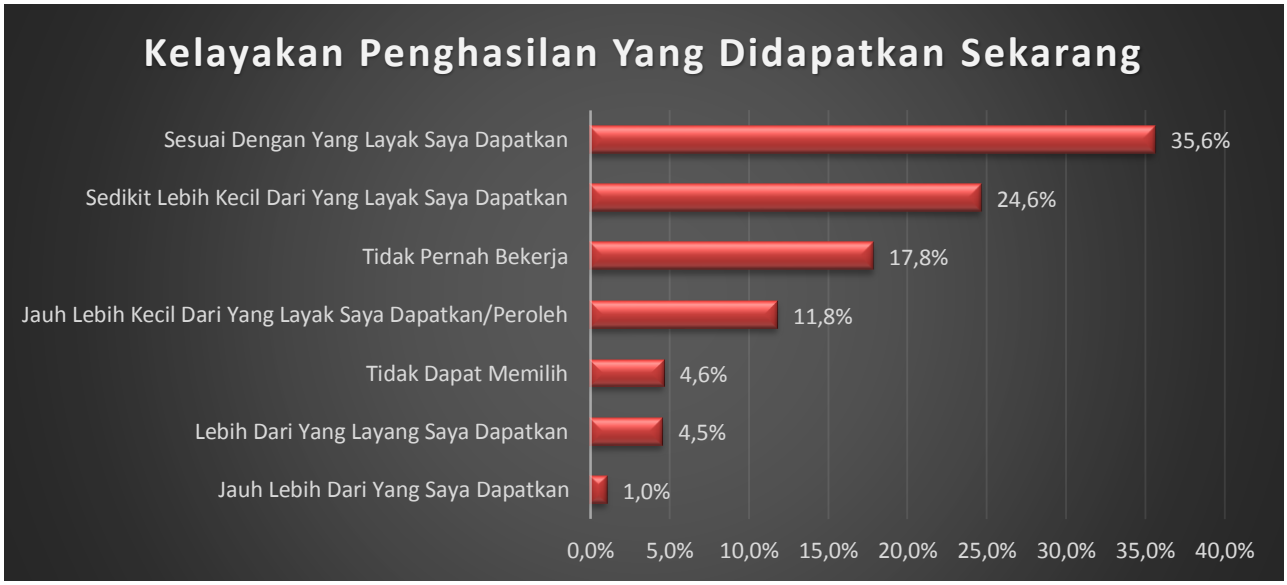

Penghasilan masih menjadi faktor yang paling besar mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial. Penghasilan dirasakan oleh warga sebagai ranah yang paling timpang dan paling besar peranannya dalam menghasilkan ketimpangan sosial. Ketimpangan penghasilan berdampak pada ketimpangan pada kepemilikan rumah dan harta benda, pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan penghasilan berkait erat dengan ketimpangan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan. Pengaruh ketimpangan penghasilan dan kesempatan kerja terhadap ketimpangan sosial keseluruhan paling besar.

2.4. Ketimpangan Berdasarkan Gender

Survei ini juga mengukur persepsi terhadap ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Persepsi terhadap ketimpangan antara perempuan dan laki-laki tergolong tinggi. Sebesar 45% responden menilai ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Hasil ini sejalan dengan penemuan beberapa ahli yang berkecimpung dalam permasalahan gender, bahwa masih banyak terjadi ketimpangan gender di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran mengenai kesetaraan gender di masyarakat, warga mulai menyadari juga adanya berbagai diskriminasi terhadap perempuan yang menghasilkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.

Dibandingkan tahun sebelumnya, persepsi warga terhadap ketimpangan gender mengalami perubahan. Pada tahun 2017 warga menilai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada 2016 hanya 31% menilai ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Berdasarkan temuan pengukuran Ketimpangan Sosial 2017, ada indikasi mengenai kebutuhan untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai aspek yang menyebabkan ketimpangan gender ini. Aspek-aspek yang dipersepsikan menjadi sumber ketimpangan adalah penghasilan, kesempatan mendapatkan pekerjaan dan rumah/tempat tinggal, dan pendidikan. Selain itu diduga pula ada pengaruh dari faktor pengambilan keputusan yang terkait dengan kesejahteraan dirinya dan kesetaraan di depan hukum. Dua aspek yang dinilai paling timpang adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

Grafik 6. Persepsi Mengenai Ketimpangan Antara Laki-Laki dan Perempuan

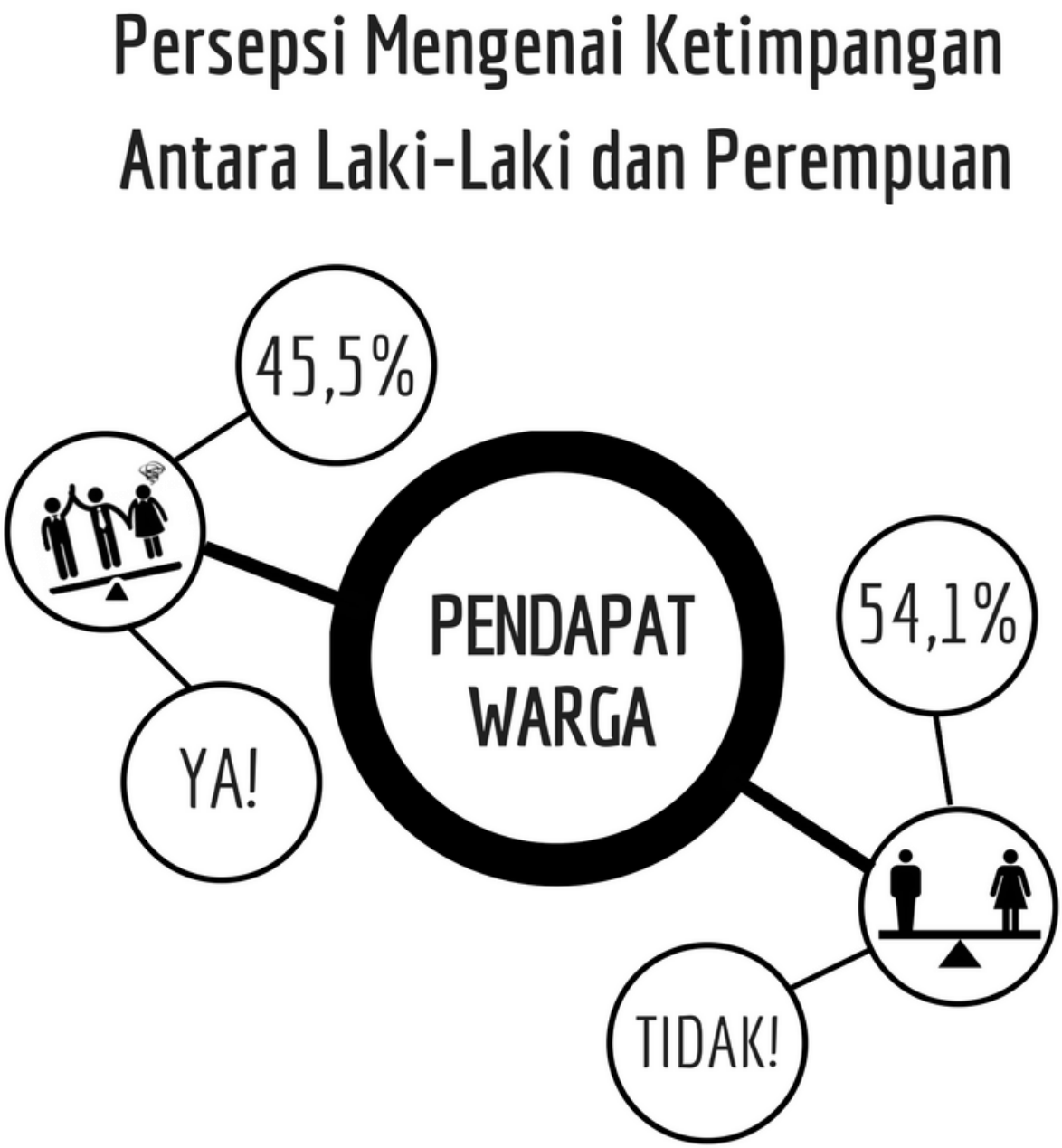

BAB 3

INDEKS KETIMPANGAN SOSIAL

" Indeks Ketimpangan Sosial adalah angka yang mengindikasikan berapa banyak ranah dalam kehidupan sosial yang dinilai warga mengalami ketimpangan."

3.1. Indeks Ketimpangan Sosial 2017

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Indeks Ketimpangan Sosial 2017 ditentukan berdasarkan banyaknya ranah yang dinilai warga mengalami ketimpangan. Semakin besar indeks maka makin banyak ranah yang dinilai mengalami ketimpangan. Definisinya adalah sebagai berikut:

“ Indeks Ketimpangan Sosial adalah angka yang mengindikasikan berapa banyak ranah dalam kehidupan sosial yang dinilai warga mengalami ketimpangan.”

Dengan dasar itu, Indeks Ketimpangan Sosial ini mengindikasikan berapa banyak ranah dari 10 ranah sumber ketimpangan yang dinilai timpang oleh seluruh responden.

Rentang Indeks: 1-10

0 = tidak ada ranah yang timpang

10 = ada ketimpangan di 10 ranah

Indeks Ketimpangan Sosial 2016 adalah 5,6 Artinya, seluruh responden menilai ada ketimpangan di 5 sampai 6 dari 10 ranah sumber ketimpangan.

Hasil ini menunjukkan ada kenaikan ketimpangan sosial menurut warga. Indeks ketimpangan yang diperoleh lebih baik dari tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan berubah dari 4,4 menjadi 5,6. Artinya setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia. Indeks ketimpangan di tahun 2017 tergolong tinggi.

Secara keseluruhan, 84% responden (dari total sampel 2250 orang) mempersepsikan adanya ketimpangan setidaknya pada satu ranah. Bisa dikatakan, 8 dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan. Peningkatan ketimpangan sosial ini mengindikasikan belum adanya usaha yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan di berbagai ranah. Evaluasi terhadap usaha penanganan masalah ketimpangan di Indonesia perlu di lakukan secara sistematis agar dapat dilakukan perbaikan yang tepat sasaran.

3.2. Indeks Ketimpangan Sosial Per Wilayah

Jika Indonesia dibagi menjadi lima, yaitu Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, dan

gugusan Indonesia bagian Timur, maka dapat kita lihat ketimpangan yang lebih tinggi berada di Indonesia Bagian Timur dibandingkan dengan wilayah lain. Dilihat per wilayah, kenaikan indeks ketimpangan ini terjadi diseluruh wilayah di Indonesia. Indeks ketimpangan tertinggi ada di Indonesia Bagian Timur, yaitu 6,57; artinya ada ketimpangan di 6 sampai 7 dari 10 ranah sumber ketimpangan.

Grafik 7. Indeks Ketimpangan Sosial di Lima Wilayah Indonesia

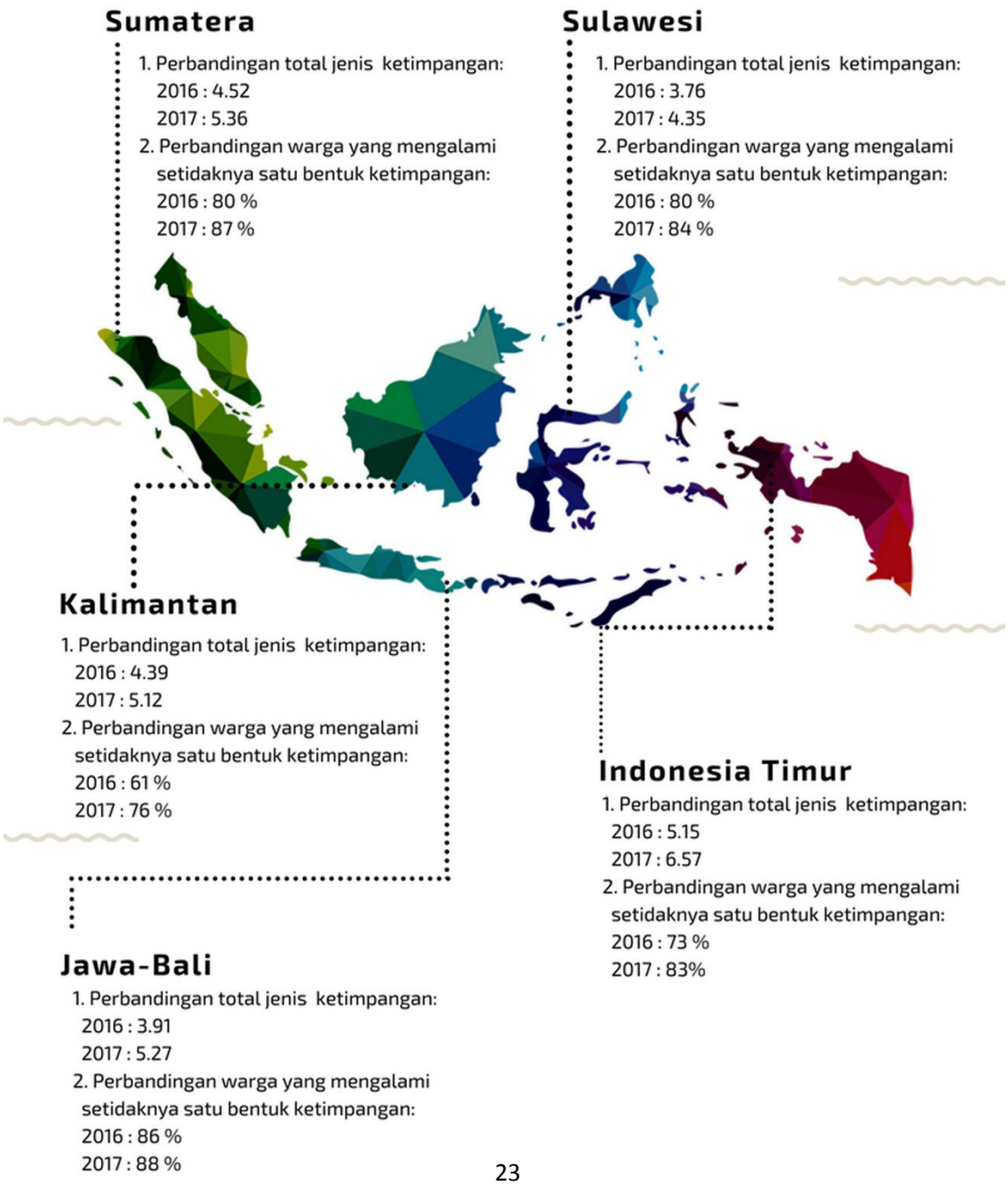

Jika Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Barat dan Timur, maka kita akan bisa melihat ada peningkatan ketimpangan pula dari tahun 2016 ke 2017. Ketimpangan di dua wilayah itu hampir setara, meski nilai indeksnya sedikit lebih tinggi di Indonesia Bagian Timur. Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan sosial di wilayah Indonesia Bagian Timur lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Barat.

Grafik 8. Indeks Ketimpangan di Dua Wilayah Indonesia

3.3 Prosentase Warga Yang Mengalami Ketimpangan Setidaknya di Satu Ranah

Sudah disebutkan terdahulu bahwa secara keseluruhan, 84% responden (dari total sampel 2250 orang) mempersepsikan adanya ketimpangan setidaknya pada satu ranah. Bisa dikatakan, sekitar tujuh dari sepuluh warga Indonesia merasakan adanya ketimpangan. Jika dibagi menjadi lima wilyah dan dilihat per wilayah, rata-rata lebih dari 80% responden di lima wilayah mempersepsikan bahwa mereka merasakan ketimpangan setidaknya di satu ranah. Persentase paling tinggi ada di Jawa-Bali, disusul Sumatra, Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur.

Persentase ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang rata-ratanya 70%. Artinya, ada indikasi dalam ranah-ranah tertentu terjadi peningkatan ketimpangan. Ini sejalan juga dengan indeks keseluruhan dan penilaian warga mengenai ketimpangan sosial secara keseluruhan. Tetapi jika dibandingkan dengan indeks ketimpangan sosial secara keseluruhan, untuk indeks per satuan ranah ketimpangan, peningkatan lebih tinggi terjadi di Indonesia Bagian Barat, khususnya Jawa-Bali dan Sumatera.

Grafik 8. Warga Yang Mengalami Ketimpangan Setidaknya di Satu Ranah Pada Lima Wilayah Indonesia

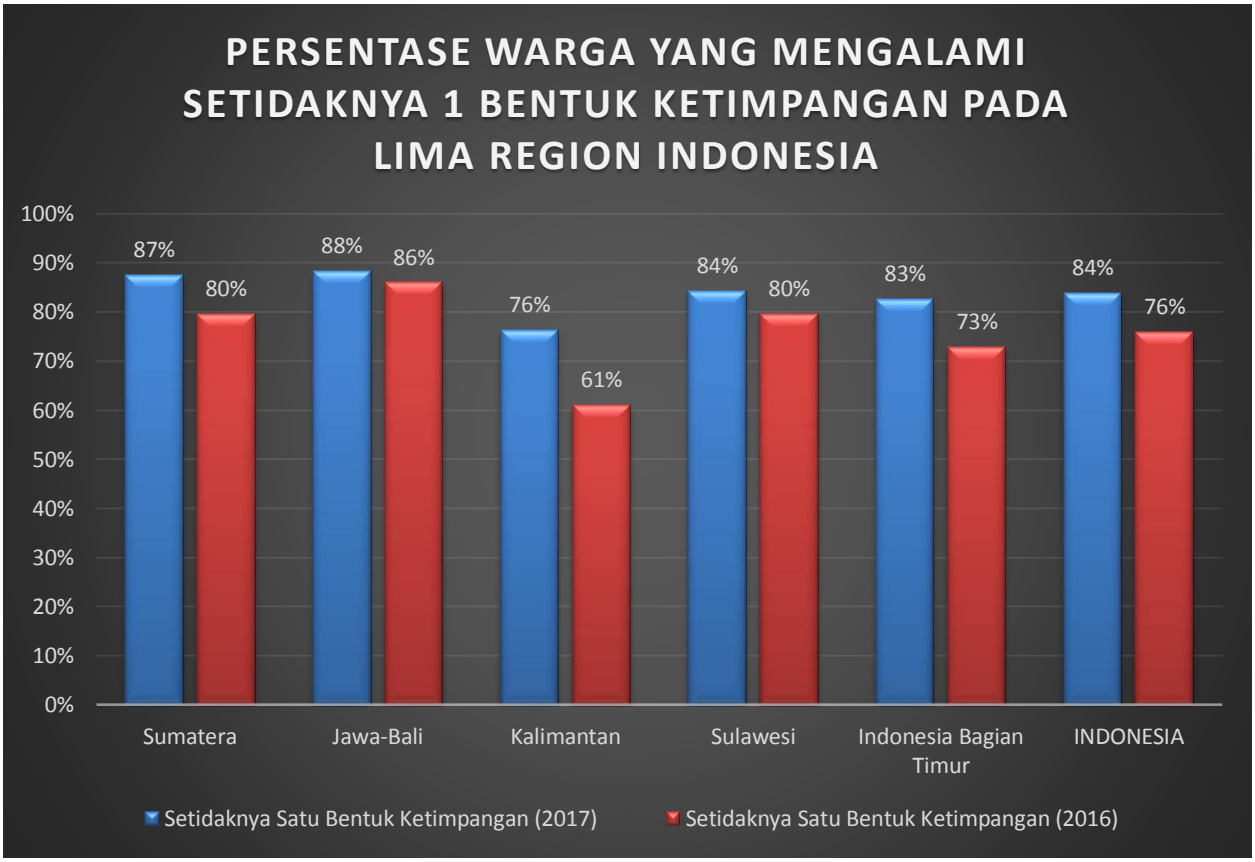

Jika dibagi menjadi dua wilayah, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, terlihat juga untuk per satuan ranah ketimpangan, persentase warga yang menyatakan mengalami ketimpangan setidaknya di satu ranah pun lebih besar di Indonesia Bagian Barat.

Grafik 9. Warga Yang Mengalami Ketimpangan Setidaknya di Satu Ranah Pada Dua Wilayah Indonesia

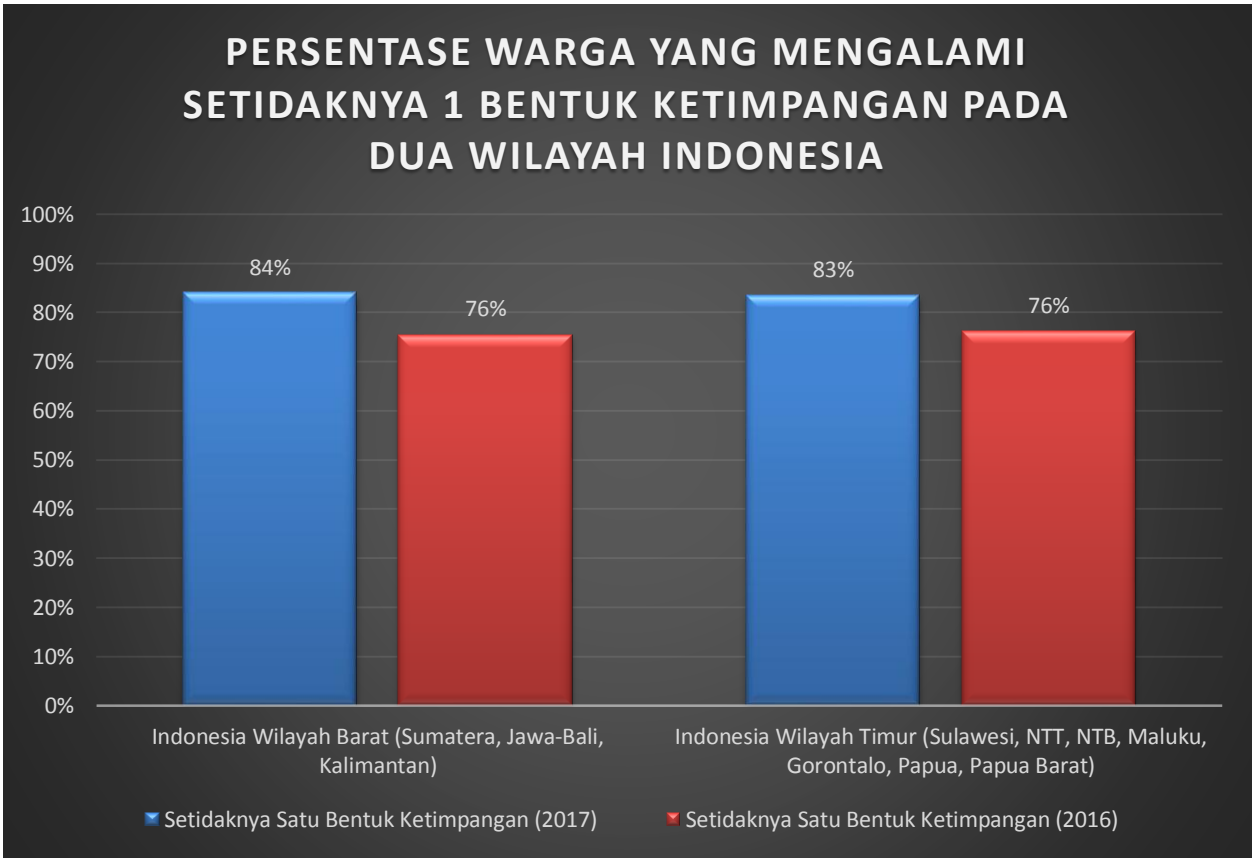

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

"Penghasilan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan dirasakan oleh warga sebagai ranah yang paling timpang dan paling besar peranannya dalam menghasilkan ketimpangan sosial."

4.1. Kesimpulan

1. Pada pengukuran kali ini, diperoleh indeks ketimpangan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan sosial pada tahun 2017 adalah 5,6. Artinya, seluruh responden menilai ada ketimpangan di 5-6 dari 10 ranah sumber ketimpangan. Indeks ketimpangan 2017 lebih tinggi dari indeks ketimpangan 2016 yang mencapai angka 4,4. Menurut penilaian warga, secara keseluruhan pada 10 ranah yang dinilai di tahun 2015 terjadi kenaikan ketimpangan.
2. Secara keseluruhan, 84% responden (dari total sampel 2100) mempersepsikan adanya ketimpangan setidaknya pada satu ranah. Dapat dikatakan, 8 dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan.
3. Kenaikan ketimpangan dirasakan oleh warga di seluruh wilayah Indonesia, baik di Indonesia Bagian Barat maupun di Indonesia Bagian Timur. Secara keseluruhan tingkat ketimpangan sosial lebih tinggi di Indonesia Bagian Timur di bandingkan wilayah lainnya di Indonesia.
4. Penghasilan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan dirasakan oleh warga sebagai ranah yang paling timpang dan paling besar peranannya dalam menghasilkan ketimpangan sosial.
5. Persepsi ketimpangan gender lebih tinggi di wilayah Indonesia Bagian Timur dibandingkan dengan wilayah Indonesia Bagian Barat.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi

1. Selain peningkatan kesempatan kerja dan penyetaraan penghasilan, diperlukan program sosial dalam bentuk pemberian tunjangan bagi pencari kerja sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan penghasilan. Pemberian tunjangan ini dapat berperan untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Bentuk dari tunjangan bagi pencari kerja dapat terdiri atas dua jenis:
    a. Tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada

warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program asuransi;

b. Tunjangan dalam bentuk bantuan konsultasi dan agen pencarian kerja bagi para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.

2. Diperlukan program sosial dalam bentuk tunjangan pelatihan kerja untuk meningkatkan atau menambah keahliannya, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Peningkatan keahlian atau tambahan keahlian baru diperlukan untuk dapat meningkatkan penghasilan para pekerja.
3. Paket penyelamatan" untuk semua orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan dengan gaji bagus, agar mereka dapat memperoleh dan mempertahankan pekerjaan dengan penghasilan yang baik.
4. Mengurangi pengangguran dengan:
    a. Skema penciptaan lapangan kerja yang disponsori pemerintah.
    b. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan kemampuan kerja, seperti skema *re-training*.
    c. Skema kesejahteraan kerja yang mendorong partisipasi pasar tenaga kerja.
    d. Menyelenggarakan program pelatihan sektoral, magang, dan program kerja sambil belajar.
    e. Berikan insentif yang kuat untuk penciptaan lapangan kerja di dalam kota/kabupaten.
5. Meningkatkan bimbingan dan upaya lainnya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik.
6. Meningkatkan dana pemerintah untuk opsi penitipan anak berkualitas tinggi.
7. Memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas

pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan

8. Realokasi dana 5-10% untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN
9. Memastikan menyempitnya kesenjangan antara daerah dalam pembangunan manusia dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas SDM bagi an kelompok masyarakat miskin.
10. Memperbaharui kebijakan pajak di Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi lndonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil.
11. Perbaikan Undang-Undang Perpajakan agar dapat mengakomodasi potensi pendapatan pajak dan realitas kekayaan kelompok super kaya Indonesia.
12. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pengurangan ketimpangan disarankan untuk dilakukan secara komprehensif. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan dampak. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan program, melainkan perlu dilakukan dalam keseluruhan rentang pelaksanaan program, sejak awal, pertengahan hingga akhir program sehingga selain dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan program berikutnya, juga menjadi dasar untuk perbaikan program yang sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

"Menurut Daron, dkk "pentingnya peran institusi politik dan institusi ekonomi dalam mendorong kemajuan dan kesetaraan". Ketika suatu negara memiliki institusi ekonomi dan politik yang inklusif, maka negara akan mempu mewujudkan kesejahteraan sekaligus kesetaraan."

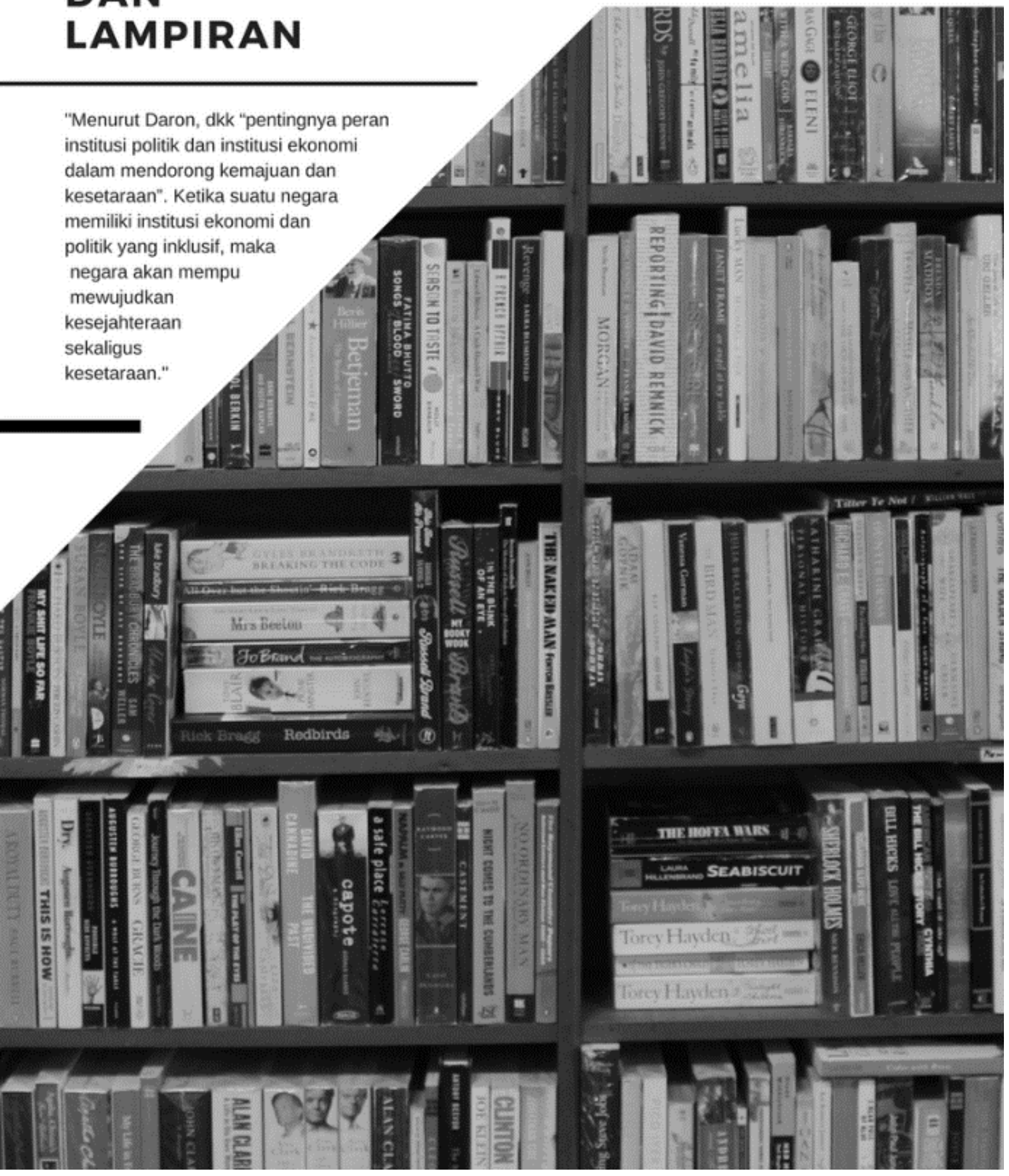

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, Daron, and James A Robinson. 2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. 1st ed. New York: Crown.

Merkel, Wolfgang (2001): The Third Ways of Social Democracy, in: Cuperus, Rene/Duffek, Karl/Kandell, Johannes (Eds.): European Social Democracy Facing the Twin Revolution of Globalisation and the Knowledge Society, Amsterdam/Berlin/Vienna: 27-62.

Naidoo, Jenny and Wills, Jane. 2008. Health Studies: An Introduction. Basingstoke: Palgrave.

Sen, Amartya (1982). *Choice, Welfare, and Measurement*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Turner, Bryan (1986) *Equality*. Chichester, and Tavistock, London: Ellis Horwood.

Lampiran 1

Kerangka Teoretik

1. Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial didefinisikan sebagai ketidakmerataan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Konsep ketimpangan sosial dikembangkan untuk dapat memberikan gambaran perbedaan antara pendapatan rata-rata, dan apa yang didapatkan oleh orang miskin dan kaya atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan konsep ketimpangan sosial dapat dikenali seberapa baik warga negara yang berbeda mendistribusikan atau berbagi pendapatan yang mereka peroleh.

Turner (1986, 34-35) mengidentifikasi empat jenis kesetaraan. Yang pertama adalah kesetaraan ontologis atau kesetaraan mendasar orang. Kedua, kesetaraan kesempatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, kesetaraan kondisi di mana ada upaya untuk membuat kondisi kehidupan yang sama bagi kelompok-kelompok sosial yang relevan. Keempat ada kesetaraan hasil atau kesetaraan hasil.

2. Ketimpangan Sosial Berdasarkan Konsep Kapabilitas Dari Amartya Sen

Menurut Amartya Sen, nasib dan kualitas hidup manusia bergantung pada sejauh mana perluasan kebebasan berlangsung. Ide mengenai perluasan kebebasan berkait erat dengan gagasannya mengenai keadilan. Sen membagi dua difinisi kebebasan yaitu *Well-Being Freedom* (kebebasan untuk mencapai kondisi baik atau dikenal dengan kapabilitas atau kesempatan untuk mencapai kondisi baik, dan *Agency of Freedom* atau kebebasan perlakukan atau kebebasan untuk mencapai sesuatu yang dianggap baik. Dua hal ini mengartikan kebebasan karena adanya kesempatan (*opportunity*) dan ada proses yang mendukung.

Pendekatan Sen kemudian diterjemahkan pentingnya melihat ketimpangan kesempatan (kapabilitas dasar: pendidikan, kesehatan) dan ketimpangan karena proses (demokrasi, kemampuan mengontrol sumber daya dan lingkungan).

3. Ketimpangan Sosial dari Sudut Pandang Ekonomi

Ketimpangan sosial dapat dilihat juga dari sudut pandang ekonomi berdasarkan pengukuran pendapatan dan aset, mencakup tabungan, properti, tanah, dan lain-lain. Pendekatan ini digunakan oleh banyak ekonom yang menulis mengenai ketimpangan seperti Thomas Piketty (*Capital in the Twenty-First Century*),

Branco Milanovic (*The Haves and the Have-Nots*), J. E. Stiglitz (*The Price of Inequaity*), Nancy Birdshall (*the World is not Flat: Inequality and Injustice in Our Global Economy*).

Sebagian besar para ekonom tersebut selain menganalisa bentuk ketimpangan, juga menguraikan sebab-sebab ketimpangan yang berkaitan dengan institusi negara.

4. Ketimpangan Sosial dari Sudut Pandang Kelembagaan atau institutional oleh Daron Acemoglu & James Robinson (*Why Nations Fails*)

Ketimpangan sosial dapat dilihat juga dari sudut pandang kelembagaan atau institutional. Pendekatan ini dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James Robinson dalam buku *Why Nations Fails*. Menurut Daron, dkk "pentingnya peran institusi politik dan institusi ekonomi dalam mendorong kemajuan dan kesetaraan". Ketika suatu negara memiliki institusi ekonomi dan politik yang inklusif, maka negara akan mempu mewujudkan kesejahteraan sekaligus kesetaraan.

Lampiran 2

Metode

1. Pendekatan

Secara umum, survei ini akan mengadopsi perspektif keadilan sosial sebagaimana disusun dalam Indeks Keadilan Sosial yang disusun oleh Wolgang Merkel/*Bertlleman Stiftung*. Tetapi *software* itu disadur dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan metode survei. Metode itu antara lain mengukur dan menilai kebijakan mengatasi kemiskinan, ketimpangan, kinerja pelayanan kesehatan, pasar kerja dan sebagainya.

2. Waktu Pelaksanaan

Pengukuran dilaksanakan selama 3 bulan dengan perincian satu bulan untuk persiapan, satu bulan pengambilan data lapangan dan satu bulan untuk pengolahan data serta pembuatan laporan.

3. Permasalahan

Indikator ketimpangan sosial:

1. Banyaknya ranah yang menjadi sumber ketimpangan sosial. Dalam pengukuran ini sumber ketimpangan sosial yang dinilai oleh warga mencakup: penghasilan, harta benda yang dimiliki, kesejahteraan keluarga, pendidikan, pekerjaan, rumah/tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal, hukum, kesehatan, dan aktivitas politik.
2. Penilaian warga mengenai seberapa jauh terjadi ketimpangan di setiap ranah yang menjadi sumber ketimpangan sosial.

Selain hendak menggali sumber dan seberapa jauh ketimpangan sosial terjadi menurut warga, dalam pengukuran ini juga digali persepsi warga mengenai penyebab ketimpangan sosial. Di sini juga digali persepsi warga tentang pihak yang semestinya bertanggungjawab atas ketimpangan sosial dan cara untuk mengatasi ketimpangan sosial. Untuk melengkapi pemahaman mengenai ketimpangan sosial, dalam pengukuran ini juga digali persepsi warga mengenai ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki, serta ada atau tidak perlakuan diskriminatif yang dialami warga. Dalam pengolahannya, dianalisis juga perbedaan persepsi mengenai ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Pertanyaan yang diajukan mengenai ketimpangan sosial terdiri atas:

1. Ranah/aspek/hal apa yang berperan menghasilkan ketimpangan sosial di daerah anda?
2. Dalam setiap ranah/aspek/hal yang berperan itu, seberapa

besar ketimpangan sosial yang terjadi di daerah anda?
3. Apa yang menyebabkan ketimpangan di daerah anda?
4. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab mengatasi ketimpangan sosial yang ada di daerah anda?
5. Apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial di daerah anda?
6. Seberapa jauh ketimpangan gender terjadi di daerah anda?
7. Apakah ada perlakuan diskriminatif daerah anda? Seberapa jauh?

4. Metode Riset

Pengukuran Ketimpangan Sosial 2015 ini termasuk dalam jenis riset kuantitatif. Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif yang mengandalkan peroleh data pada wawancara, observasi dan kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *self-report*. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban (*self-report*). Melalui *self-report* partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Dilihat dari tujuan dan pengolahan datanya, pengukuran barometer sosial ini termasuk dalam jenis riset deskriptif dan korelasional. Variabel-variabel yang diukur akan dideskripsikan dan dikorelasikan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antar-variabel.

5. Jumlah Responden dan Teknik Sampling

Jumlah responden mencakup 2500 orang. Mencakup responden di 34 provinsi di Indonesia. Metode survei yang digunakan adalah suvei dengan menggunakan kuesioner.

Teknik sampling yang digunakan adalah *multistage random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara bertingkat, pertama dengan menentukan kelompok-kelompok sampel, kemudian sampel dipilih secara random dari kelompok-kelompok itu. *Multistage random sampling* seperti *cluster sampling*, tetapi melibatkan pemilihan sampel dalam *cluster* yang dipilih. Dengan teknik ini, pemilihan sampel dilakukan paling sedikit pada dua tahap (*stage*).

6. Penyusunan Instrumen Pengukuran

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran barometer sosial dan ketimpangan sosial ini adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial.
2. Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial.
3. Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (*domain*)Barometer Sosial dan Ketimpangan Sosial yang akan diukur.
4. Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan dibuat berkaitan dengan tingkah laku yang akan diukur dari konstruk.
5. Konstruksi sejumlah item (*items pooling*).
6. *Review* item, uji keterbacaan, *expert judgment* dan revisi.
7. *Tryout*: Pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari populasi yang dituju oleh alat ukur.
8. Analisis item: Pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau melakukan revisi terhadap item-item itu.
9. Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final.
10. Membuat manual administrasi, skoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur (di antaranya membuat tabel norma, standard performa, dan *cutting scores*).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti. Teknik analisis data yang akan digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis korelasional dan pemodelan.

Untuk melihat gambaran umum subjek penelitian dilakukan perhitungan persentase, rata-rata (*mean*) serta penyebaran usia dan jenis kelamin subjek melalui statistik deskriptif. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen barometer sosial dan hubungannya masing-masing terhadap variabel lain dilakukan dengan perhitungan *multiple correlation* dan *multiple regresion*. Untuk melihat hubungan pengaruh antar-variabel barometer sosial digunakan analisis persamaan struktur (*structural equation modelling*) satu arah dengan hubungan resiprokal yang dilakukan dengan menggunakan perangkat-lunak Lisrel.

International NGO Forum on Indonesian Development